

Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Di Kampung Peunayong

Sri Ahmat Helmisyah
UIN Ar-Raniry Aceh
sriahmathelmisyah@gmail.com

Rifki Rosyad
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rifkirosyad@uinsgd.ac.id

Pengutipan yang Disarankan:

Helmisyah, Sri Ahmat dan Rosyad, Rifki. (2021). Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Di Kampung Peunayong, Volume 4, Nomor 1: 27–35. 10.15575/jt.v4i1.11200

Riwayat Artikel:

Received Desember 2020; Revised Februari 2021; Accepted April 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study focuses on the existence of ethnic Chinese in Peunayong Village, Banda Aceh City. Ethnic Chinese have been associated with Indonesia hundreds of years ago. Ethnic Chinese came to the archipelago to establish cooperation in terms of friendship and also in trade. The relationship between Indonesia and the Chinese ethnic group continued, especially in the Kingdom of Aceh until the Dutch East Indies colonial rule. The article will discuss how the life of the Chinese ethnic group during the Dutch East Indies colonial era until today. The aim is to find out about the existence of ethnic Chinese in Peunayong Village and the relationship between Acehnese ethnic and Chinese. This paper uses secondary research methods, namely research that utilizes secondary data, existing data. Secondary data can be in the form of research results data; it can also be documentary data on institutional administration. It is hoped that knowing the existence of the Chinese ethnic group can make a difference in society and not cause conflicts.

Keywords: *institutional administration, rural sociology, acculturation, social development*

Abstrak:

Penelitian ini berfokus keberadaan Etnis Tionghoa di Kampung Peunayong Kota Banda Aceh. Etnis Tionghoa sudah berhubungan dengan Indonesia ratusan tahun yang lalu. Etnis Tionghoa datang ke Nusantara untuk menjalin kerjasama dalam hal persahabatan dan juga dalam perdagangan. Hubungan Indonesia dengan etnis Tionghoa terus berlanjut khususnya di Kerajaan Aceh sampai masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Tulisan akan membahasa tentang bagaimana kehidupan etnis Tionghoa di dari masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sampai saat ini. Tujuannya untuk mengetahui keberadaan etnis Tionghoa di Kampung Peunayong dan hubungan etnis Aceh dengan etnis Tionghoa di tempat tersebut. tulisan ini menggunakan metode penelitian sekunder yaitu penelitian yang memanfaatkan data sekunder, data yang sudah ada. Data sekunder bisa berupa data hasil penelitian, dapat pula data dokumenter administratif kelembagaan. Diharapkan dengan diketahuinya keberadaan etnis Tionghoa tersebut, dapat membuat perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik-konflik.

Kata Kunci: *administrasi kelembagaan, sosiologi pedesaan, akulturasi budaya, perkembangan sosial*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara besar serta multi-etnis yang memiliki keragaman budaya. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya berbagai suku, ras serta etnis yang beragam tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Rahman, 2010). Setiap daerah tentunya memiliki penduduk asli yang terlebih dahulu berada di sana, dan membagan pola kebudayaannya dengan identitas

masyarakat tertentu yang mendominasi wilayah tersebut (Said, 2019). Namun demikian, selain penduduk asli, banyak tempat di wilayah Indonesia yang juga memiliki penduduk pendatang. Mereka mulai hidup berdampingan sebagai masyarakat pendatang di dalam kalangan penduduk asli.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu dari sekian banyak yang datang dan menetap di Indonesia. Kedatangan bangsa Tionghoa tentunya tidak hanya mencari penghidupan saja, karena secara tidak langsung etnis Tionghoa membawa kebudayaannya dari tanah kelahirannya, bahkan mereka juga menyebarkan keyakinan yang dianutnya. Sehingga menjadikan Indonesia semakin kaya akan kebudayaan, baik bahasa, adat istiadat, agama dan keyakinan. Etnis Tionghoa merupakan bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang sudah lama ada, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Kehadiran etnis Tionghoa di Nusantara seolah sudah menyatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan negara Indonesia. Keberadaan mereka, di samping terjadi asimilasi harmonis, terkadang juga mengalami konflik horizontal dengan masyarakat pribumi, serta memunculkan pendiskriminasian terhadap etnis Tionghoa. Perjalanan etnis Tionghoa yang panjang dan perannya sebagai bagian yang turut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan juga dalam membangun Indonesia nampaknya tidak menjadi nilai positif bagi mereka di mata etnis pribumi lainnya di Indonesia (Ferlando & Agustono, 2019), setidaknya dalam beberapa kasus diskriminasi yang pernah terjadi pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1740 yang merupakan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di kota Batavia (sekarang menjadi Jakarta) (Kwartanada, 2009). Konflik antara etnis Tionghoa terus berlangsung pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum lahirnya Reformasi tahun 1998 (Ricklefs, 2005).

Walaupun etnis Tionghoa tergolong dalam masyarakat minoritas di Indonesia, sebenarnya etnis Tionghoa sudah hadir di Indonesia sudah sejak ratusan, bahkan ribuan, tahun yang lalu. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pemukiman-pemukiman penduduk Tionghoa di Nusantara. Etnis Tionghoa yang pergi ke seberang lautan selain karena faktor ekonomi juga mencari perlindungan dari pengaruh politik negara leluhurnya. Hubungan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi terjadi dengan sendirinya dan secara alami melakukan interaksi tanpa terjadi sesuatu peristiwa yang berarti. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada umumnya etnis Tionghoa datang ke Indonesia adalah kaum laki-laki yang kemudian mempersunting perempuan setempat untuk dijadikan istri mereka sehingga adanya percampuran antara kebudayaan etnis Tionghoa dan kebudayaan lokal. Akhirnya pembauran asimilasi terjadi tanpa ada rekayasa dan paksaan (Dahana, 2000).

Sejarah pertama kali etnis Tionghoa datang ke Indonesia di dalam dokumen Tiongkok klasik yang disusun oleh sejarawan istana pada masa Dinasti Han 206 SM-220 M. Sementara itu catatan awal kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia baru muncul pada abad ke 5. Etnis Tionghoa pertama yang datang ke Indonesia ialah seorang pendeta agama Buddha. Pendeta tersebut bernama Fa Hien. Ia melakukan perjalanan darat dari Tiongkok ke India pada tahun 400 M. Ketika dalam perjalanan pulang lewat laut, Pendeta Fa Hien singah di pulau Jawa (Putri, 2020) pada tahun 413 M. pada waktu singah ia mengatakan tidak ada etnis Tionghoa yang tinggal di pulau Jawa. Dalam catatan sejarah Cina klasik mengatakan bahwa etnis Tionghoa pergi ke Indonesia terjadi pada akhir pemerintahan dinasti Tang. Daerah pertama kali didatangi ialah Palembang, pada saat itu merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya. Kemudian etnis Tionghoa merantau ke pulau Jawa untuk mencari rempah-rempah. Pada akhirnya mereka ada yang menetap di daerah pelabuhan pantai utara pulau Jawa (Abidin, 2016).

Hubungan dagang Indonesia dengan Tionghoa telah terbina sejak abad ke-13, dan para pendatang baru banyak yang imigran pada waktu negara Tiongkok diperintah oleh dinasti Ming (1368-1644). Pada tahun 1412 armada Tiongkok di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho datang ke pulau Bintan. Armadanya singah di pulau Bangka Belitung, kepulauan Karimata, pulau Jawa, Madura, termasuk Aceh. Kontak dagang dan budaya pada awal persinggahan etnis Tionghoa ke Nusantara berlangsung lama dan harmonis sehingga masyarakat Tionghoa dapat hidup damai dan tenteram, karena umumnya hidup tidak eksklusif dan tidak berkelompok.

Pada singah pertama sekali di Aceh, Cheng Ho mengerahkan 317 kapal, termasuk 60 kapal induk "kapal harta" (*baochuan*), dan lebih dari 27.000 awak kapal. Armadanya memiliki ukuran besar, masing-masing dengan panjang 120 m, bagian terlebar 50 m, dengan sembilan tiang layar, geladak utama seluas 4.600 m dan bobot sekurang-kurangnya 2.700 metrik ton. Kapal-kapal Cheng Ho pada masa itu mengalahkan kapal-kapal dari Eropa. Bahkan mengalahkan armada besar dari Columbus tahun (1492), *Santa Maria* (Nontji, 2020).

Dalam catatan sejarah perjalanan Cheng Ho yang dicatat oleh pembantunya Ma Huan dan Fei Xin, bahwa secara geografis wilayah Samudera Pasai dideskripsikan memiliki batas wilayah dengan pergunungan tinggi disebelah selatan dan timur, setra jika terus ke arah tkimur berbatasan dengan Kerajaan Aru, sebelah utara dengan laut, sebelah barat berbatasan dengan kerajaan *Nakur* dan *Lide*. Sedangkan ke arah barat berjumpa dengan kerajaan *Lambri* (Lamuri) yang disebutkan waktu itu bisa menempuh perjalanan selama 3 hari 3 malam dari kerajaan Samudera Pasai.

Ketika Cheng Ho singah perdana di Samudera Pasai, yang berkuasa saat itu ialah Ratu Nahrasiyah memerintahkan tahun 1405-1428 M. sang ratu sendiri merupakan anak dari Zainal Abidin Malikulzahir atau cucu Sultan Malikussaleh. Berkuasa dengan arif selama 20 tahun lebih. Ratu Nahrasiyah dikenal arif dan bijak, memerintahkan dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Harkat dan martabat perempuan begitu mulia sehingga banyak yang menjadi penyiar agama islam pada masa pemerintahannya. Ratu Nahrasiyah meninggal pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 atau 1428 M. Keterangan sejarah berupa nisan, tentang Ratu nahrasiyah juga juga terdapat dalam sejarah Cina di atas. Buku itu tersebut berupa laporan umum mengenai pantai-pantai Sumatera waktu itu. Namun juga menyebutkan tentang raja yang berkuasa pada saat itu. Ma Huan

seorang seorang pelawat Cina Muslim dalam pengantar buku itu menjelaskan, karena dapat menejemah buku-buku asing, ia dikirim oleh maharaja Cina ke berbagai negeri mengiringi Laksamana Cheng Ho (Putra, 2020).

Perjalanan Pelayaran armada Cheng Ho ke Nusantara, juga membawa barang-barang dagang dari Tiongkok seperti, keramik porselin, sutra, berbagai barang logam seperti emas, besi, perak, perunggu, kertas, teh, obat-obatan, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Sedangkan dari hasil bumi Nusantara armada Cheng Ho membawa pulang antara lain rempah-rempah, kemenyan, kapuk, belerang, kayu cendana, sarang burung, dan lain-lain.

Ekspedisi etnis Tionghoa ke Indonesia yang dipimpin laksamana Cheng Ho memang membawa pasukan tentara yang luar biasa besar, tetapi tidak bermaksud untuk memerangi atau menjajah negeri-negeri yang disinghinya. Pasukannya lebih dimaksudkan untuk menjamin keamanan dalam pelayaran perniagaan Laksamana Cheng Ho pernah menghadapi tindakan gerombolan bajak laut asal Canton, Cheng Zhuji, yang terkenal ganas beroperasi di perairan sekitar Palembang dan Malaka. Hampir setiap pelayaran yang lewat Selat Malaka dihadang oleh bajak laut Chen Zhuji, tetapi pada akhirnya dapat ditangkap dan ditawan, sampai akhirnya dieksekusi di hadapan masyarakat di Nanjing.

Dalam tujuh kali pelayaran besar laksamana Cheng Ho, ia selalu singgah pelabuhan-pelabuhan yang berada di Nusantara khususnya di wilayah Aceh seperti Samudera Pasai, Nakur, Aru, Lide, Lambri. Tentunya merupakan suatu ketakjuban tersendiri bila menyaksikan kedatangan armada yang terdiri dari ratusan kapal dibawahnya, yang memenuhi suatu daerah singgahnya (Usman, 2009). Etnis Tionghoa yang dipimpin Laksamana Cheng Ho ketika singgah di Aceh sangat menunjukkan kepedulian tinggi dengan penduduk lokal. Dalam kapal besar yang di pimpinnya, Cheng Ho memiliki medis dan tim petania yang diturunkan pada daerah-daerah yang singgahnya.

Di Aceh, secara khusus karena kejujuran masyarakat kerajaan Samudera Pasai, Cheng Ho membuka basis dengan mendirikan *guanchang* (gudang) besar. Samudera menurut armada Cheng Ho dipandang sebagai pelabuhan kunci bagi belahan utara Selat Malaka. Disebut dalam sejarah, Samudera kemudian digunakan oleh Cheng Ho sebagai tempat "pemberhentian" di jalur ke selatan India. Jalur ini juga dianggap sebagai pelabuhan terakhir sebelum kapal-kapal memulai pelayaran panjang melintasi Samudera Hindia ke Ceylon dan bagian selatan India. Hubungan dan kerjasama antara Samudera Pasai dengan Dinasti Ming yang bertahun-tahun kemudian terjalin melalui kunjungan berbalas antara dua negara.

Dalam kunjung Cheng Ho banyak peninggalan di Nusantara yang masih bisa di saksikan sekarang ini serti genta atau lonceng raksasa yang diberi nama Cakradonya yang dulunya lonceng tersebut pernah digunakan pada masa kerajaan Iskandar Muda yang di gantung di armada perang di masa kerajaan Iskanda Muda. Lonceng Cakradoya masih bisa disaksikan di Museum Banda Aceh. Ada pun barang-barang peninggalan etnis Tionghoa masih bisa di jumpai seperti piring keramik bertulisan Ayat Kursi di Keraton Kesepuhan Cirebon, dan beberap kelenteng Sam Po Kong di Semarang, Kelenteng Sam Po Sui di Ancol, dan masi banyak peninggalan lainnya. Berbagai peninggalan lain dari etnis Tionghoa yang di pimpin laksamana Cheng Ho juga dapat di temui di banyak negeri lainnya yang pernah dikunjunginya.

Selain etnis Tiongho melakukan muhibah di kerajaan Samudera Pasai, Lamuri dan wilayah Kerajaan Aceh lainnya, etnis Tionghoa juga mengenalkan kepada masyarakat lokal berbagai pengetahuan seperti berbagai teknik bangunan, pertanian, penggunaan alat timbangan yang penting dalam perniagaan, kelender untuk menemukan hari-hari yang penting. Berbagai jenis makanan, berbagai bentuk kesenian dan lainnya. Sebaliknya, etnis Tionghoa Cheng Ho menerima atau meyerap berbagai hal yang berasal dari kerajaan Aceh. Sebagai etnis Tionghoa muslim yang taat, Cheng Ho berperan dalam penyampai dakwah Islam di tempat-tempat yang dikunjungi di Kerajaan Aceh. Meskipun demikian etnis Tionghoa sangat toleransi hidup berdampingan dengan masyarakat lingkungannya yang tetap berjunjung agama dan budaya tradisional Tiongkok.

Dalam pelayaran armada Cheng Ho yang terakhir, sebagian armadanya masuk sampai ke Jeddah di Arabia, dan banyak awak kapal yang muslim berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Cheng Ho sendiri tidak masuk ke Mekkah tetapi mengutuskan sahabatnya dekatnya, Ma Huan, ke sana, sementara Cheng Ho menunggu di Calicut (India Selatan). Dalam pelayaran yang terakhirnya yang ketujuh atau yang terakhir ini Cheng Ho wafat pada tahun 1433 M. ini berarti Cheng Ho menghabiskan sekitar 30 tahun untuk melaksanakan pelayaran-pelayaran kolosal, hampir tiada henti. Sebagian penulis biografi Cheng Ho menyatakan bahwa laksamana Ceng Ho itu kembali ke Tiongkok dan meninggal dua tahun kemudian di Nanjing. Namun batu nisan bertulisan namanya di lereng bukit di pinggir kota Nanjing itu kosong, ada spekulasi bahwa kemungkinan besar Cheng Ho wafat dalam perjalanan pulang dan dimakamkan di lepas pantai Malabar, India.

Setelah Cheng Ho wafat, ekspedi-ekspedisi kolosal dari Tiongko tidak lagi diteruskan. Setelah pergantian pemerintah di Tiongkok, ekspedisi dengan pelayaran jauh ini dipandang terlalu mahal, dan tidak sebanding dengan manfaat yang di peroleh. Tetapi Cheng Ho telah menoreh sejarah penjelajah maritim kolosal yang banyak membawa iklim perdamaian dan pertukaran budaya di berbagai penjuru dunia, termasuk di Nusantara. Cheng Ho juga telah ikut partisipasi menyebarkan syiar Islam di Nusantara (Nontji, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia pada masa pemerintaha kolonial Belanda waktu itu dimanfaatkan demi politik daganga Belanda. masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia sangat pandai berdagang sehingga digunakan sebagai media untuk menjembatani antara pedagang kecil di pelosok desa-desa dengan pedagangan besar yang dikuasai

oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia mereka telah menguasai pasar.

Etnis Tionghoa kembali datang ke Banda Aceh. Kedatangan kali ini berbeda dengan sebelumnya, mereka didatangkan oleh Belanda dalam rangka mendukung pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Dikarenakan pada saat tersebut di Tiongkok sedang mengalami kemiskinan, kelaparan, ketidakamanan, dan kekacauan politik. Hal inilah yang mendorong kembali masyarakat Tiongkok memilih hijrah dari negara asalnya ke negara Asia Tenggara, salah satunya adalah Banda Aceh. Awal kedatangan masyarakat Tionghoa ke Banda Aceh, mereka banyak dipekerjakan oleh kolonia Belanda sebagai buruh. Kemudian perlahan setelah Indonesia merdeka, mereka banyak memutuskan tetap tinggal di Banda Aceh dan daerah lain di Provinsi Aceh untuk bertahan hidup, karena untuk kembali pun ke asal mereka sebahagiannya tidak mampu merealisasikannya. Masyarakat Tionghoa yang memilih menetap hidup di Aceh melanjutkan dengan upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan dengan berdagang. Karena berdagang merupakan suatu kebudayaan yang telah mendarah daging bagi masyarakat Tionghoa (Setiawan, 2017).

Seiring berjalannya waktu tampak fenomenal bahwa masyarakat etnis Tionghoa mengalami segregasi (pengucilan sejak zaman Kolonial Hindia Belanda. segregasi tersebut semakin menguat semasa orde Lama dan Orde Baru melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung memecahkan persatuan antar etnis yang ada. Di antara kebijakan tersebut adalah terbatasnya hak-hak warga Tionghoa pada akses-akses tertentu di antaranya dilarang perayaan-perayaan hari besar Tionghoa, pemakaian huruf Cina, pemakaian bahasa Cina, pemakaian huruf Cina dan juga pernikahan antar etnis Tionghoa dengan pribumi. Bahkan dalam bidang perkerjaan warga Tionghoa mendapatkan akses terbatas, mereka tidak di pekenankan bekerja pada instansi-istansi pemerintah, sehingga, tidak ada pilihan lain kecuali berdagang (Ferlando & Agustono, 2019).

Kampung Peunayong merupakan salah satu pusat dagang yang berada di tengah Kota Banda Aceh. Berbeda dari kebanyakan daerah kabupaten/kota lainnya di Aceh, penduduk Kampung Peunayong, dari sisi komposisi ras, etnis dan agama, menunjukkan sebagai masyarakat yang majemuk. Namun demikian, data statistik komposisi penduduk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Banda Aceh dari sisi keyakinan religius merupakan penganut agama Islam.

Kawasan Peunayong ini sebagai pusat kota Banda Aceh yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan berdagang dan jasa menjadi tempat ini memiliki magnet untuk masyarakat kota Banda Aceh sendiri untuk melakukan aktifitas sehari-hari berupa interaksi sosial seperti jual beli dan juga aktivitas lainnya yang saling menguntungkan antar sesama etnis Tionghoa dan masyarakat Kota Banda Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang keberadaan Etnis Tionghoa di Banda Aceh Khususnya di Kampung Peunayong, sehingga bersifat etnografis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yang menerapkan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data secara studi dokumentasi, berbagai buku atau sumber-sumber internet. Kemudian dilakukan penyuntingan terhadap data yang telah didapatkan sebelumnya lalu dicek silang dalam hasil validasi data. Kemudian dalam penyajian, data diubah ke dalam kalimat-kalimat sesuai yang tersusun secara sistematis, baik sebagai analisis maupun interpretasi berdasarkan konsep-konsep yang sesuai dengan tulisan yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mula kedatangan etnis Tionghoa di ke Banda Aceh secara berombolan di bawah komando Belanda, terjadi suatu jaringan di antara etnis Tionghoa di Banda Aceh. Pada mulanya, etnis Tionghoa datang sebagai pedagang ke Indonesia. di Aceh etnis Tionghoa sudah ada sejak adanya interaksi manusia di Nusantara dengan etnis lainnya. Sejak jaman dulu etnis Aceh sudah dipengaruhi oleh berbagai etnis seperti India, dan Timur Tengah, sehingga interaksi sosial dengan etnis dari Tionghoa ke Aceh tidak mempunyai kendala dalam budaya dan lingkungan. Meskipun etnis Aceh semuanya beragama Islam. Kehadiran etnis Tionghoa di Aceh sebagai sahabat dalam berbisnis dan saling menjaga satu sama lain. Terjadinya hubungan yang resmi dengan etnis Tionghoa pada abad ke-13, hal ini dikarenakan ada hubungan diplomatik dengan negara China. Setelah banya itu banya etnis Tionghoa berdatangan ke Aceh untuk berdagang dan juga etnis Tionghoa senang berdagang dan merantau tersebut tidak dimusuhi karena etnis Tionghoa saudagar. Dengan adanya pedangan etnis Tionghoa, masyarakat dapat bekerja pada mereka. Bahkan sebelum adanya pembatasan gerak terhadap orang Tionghoa, mereka dapat hidup sampai ke pelosok desa-desa. Kehadiran etnis Tionghoa ke Aceh sebagai saudagar yang membeli barang-barang hasil alam seperti rempah-rempah, lada, pinang, dan hasil lain yang tumbuh di hutan Aceh, sebaliknya dengan orang Aceh membeli barang-barang bawaan etnis Tionghoa seperti keramik, guci, dan bahan jadi lainnya. Oleh sebab itu etnis Tionghoa yang hidup dengan budaya dagang bagi masyarakat Aceh sendiri tidak menjadi persoalan, jika tidak mengganggu ketentraman lingkungan dan agama.

Penulis dalam sebuah wawancara dengan Pak Razali seorang pedangan sayur di Pasar Peunayong. Beliau menceritakan bahwa banyak pemuda Aceh yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mereka lebih memilih mencari kerja pada etnis Tionghoa di Banda Aceh, sebagai karyawan toko bahkan ada juga yang bekerja di bengkel etnis Tionghoa. Hal tersebut saling menguntungkan bagi etnis Tionghoa dan juga etnis Aceh untuk memperlancar jalanan bisnis. Sebaliknya ada juga etnis Tionghoa yang bekerja dengan orang Aceh seperti pengrajin emas dan pekerjaan lainnya.

Demikian juga yang terjadi dimasa pemerintahan Belanda, banyak etnis Tionghoa yang bekerja pada pemerintahan Belanda untuk memperlancar pemerintahan Belanda. di samping itu juga etnis Tionghoa yang pandai berdagang tersebut sedikit membawa keuntungan bagi masyarakat Aceh bagi pemerintah maupun masyarakat lingkungan sekitar. Kehadiran etnis Tionghoa di Aceh tidak menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Karena banyak etnis Tionghoa lebih banyak menyibukkan diri dalam persoalan dagang sehingga persoalan kemasyarakatan tidak mereka hiraukan. sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan, banyak etnis Tionghoa yang tinggal di desa-desa, berdagang, dan hidup dengan masyarakat sekitar lainnya. Akan tetapi kehidupan etnis Tionghoa menjadi terusik dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sebelum dan sesudah kemerdekaan sehingga gerak-geriknya dalam bidang dagang dan buday sangat dibatasi. Dikarenakan dengan hal tersebut terciptalah suatu pemukiman-pemukiman etnis Tionghoa yang terkonsentrasi dan terpusat di kota-kota besar. Berkaitan dengan pembatasan tersebut gerak-gerik etnis Tionghoa dan pembentukan pola pemukiman disebutkan Coppel sebagai berikut:

Banyak orang, baik orang diluar maupun orang-orang Indonesia sendiri, menganggap orang-orang Tionghoa sebagai kelompok daerah kota yang paling menonjol. Berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan, barangkali akan lebih banyak terpusat di daerah pedesaan dan golongan penduduk Tionghoa tampaknya merupakan penduduk kota dari pada yang sebenarnya. Namun tahun 1930 bukan tahun yang khas. Sejak pemukiman paling awal dari pedagang Tionghoa di kota-kota pelabuhan yang terletak di pantai utara itu, orang-orang Tionghoa Jawa selalu cenderung berkumpul dalam kelompok sendiri di kota-kota. Bagi orang-orang Tionghoa hal tersebut bukan hal yang aneh, sebab pedagang lain misalnya orang-orang India juga berbuat demikian (Coppel, 1994).

Banyak etnis Tionghoa yang memilih tinggal di pusat kota atau di tempat yang banyak penduduk. Sebelum kemerdekaan banyak etnis Tionghoa yang tinggal di pelabuhan-pelabuhan karena lebih mudah mencari informasi dan pelabuhan merupakan tempat untuk transaksi perdagangan memudahkan mereka berbisnis. Kebutuhan untuk berdagang dan tuntutan untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya membuat etnis Tionghoa cenderung bertepatan tinggal dengan kelompoknya sekaligus dapat berluasa membuka usaha. Demikian dengan hanya tekanan-tekanan dari luar etnis Tionghoa sendiri, misalnya danya ketentuan tertentu dari pemerintah untuk mengatur etnis guna memudahkan pemerintah mengatur dan mengorganisir etnis Tionghoa sendiri di Nusantara. Sehubungan dengan pembentukan pemukiman disebutkan dalam Suryadinata sebagai berikut:

Perbedaan etnis antara Tionghoa dan pribumi merupakan salah satu sebab terpisahnya kelompok etnis Tionghoa. Namun tidak kalah pentingnya adalah kebijakan pemerintah Kolonial Belanda misalnya sistem opsi (Kapital China), sistem pemukiman dan pas jalan, yang membuat orang-orang Tionghoa tidak membaur (Suryadinata, 2002).

Pada masa itu etnis Tionghoa didatangkan secara langsung oleh Pemerintah Belanda dari Tiongkok, dan langsung dikoordinasi oleh seorang kapten yang berasal dari keturunan etnis Tionghoa sendiri supaya mudah dikendalikan. Demikian juga jika etnis Tionghoa berdagang diharuskan memiliki Pas Jalan. Adanya kebijakan tersebut etnis Tionghoa membuat etnis Tionghoa berbeda dengan etnis yang lainnya yang ada di Indonesia. Di samping itu etnis Tionghoa di jadikan pedagang eceran sekaligus dimasukkan ke dalam strata menengah oleh pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sedangkan strata terbawah adalah bangsa pribumi. Sebaliknya, bangsa Eropa dimasukkan ke dalam strata kelas tinggi.

Adanya strata yang ada dalam masyarakat sehingga terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat pribumi. Strata tersebut di buat oleh pemerintah Hindia Belanda agar masyarakat lain selain bangsa Eropa khususnya tunduk dan rendah diri terhadap mereka. Ini dikarenakan bangsa Eropa menganggap dirinya berbudaya tinggi. Sedangkan kelas yang berada di bawah mereka seperti kelas menengah tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi dalam politik. Jika bangsa lain seperti bangsa Timur seperti Arab, India dan China berbaur dan tidak membedakan dengan bangsa pribumi, dikhawatirkan akan menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap etnis Tionghoa yang berbentuk Opsir, Sistem Pemukiman, dan Pas jalan disebut dalam Suryadinata sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda supaya memudahkan secara administratif. Biasa etnis Tionghoa yang berada di Jawa sering memilih hidup dengan sesama kelompok sendiri.
2. Kebijakan ini supaya menguntungkan secara ekonomi, sebab ini menjaga kestabilan sosial yang ada. Di bawah kebijakan ini, nonpribumi bermukim di perkotaan, sedangkan pribumi hidup di pedesaan. Di larang nonpribumi hidup di pedesaan hal ini dimaksudkan supaya mereka tidak terpengaruh oleh penduduk desa sehingga menghindari kemungkinan terjadinya kegoncangan sosial.
3. Kebijakan yang dibuat pemerintah Belanda sesuai keinginan secara politis. Pemerintah Hindia Belanda percaya bahwa pemerintah kolonial akan terancam jika ras berbeda, umpamanya Tionghoa dan Jawa, bergabung untuk melawan mereka. Karena politik pemisahan ini signifikan, maka penting untuk diperiksa secara teliti (Suryadinata, 2002).

Sistem Opsi merupakan suatu cara untuk mengatur etnis Tionghoa agar terpisah dengan masyarakat pribumi, sehingga untuk mempermudah pihak Belanda untuk mengatur maka dari itu diangkat seseorang dari kalangan Tionghoa untuk mengurus etnis Tionghoa yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan yang berhubungan dengan perintah sipil. Namun kegiatan yang bersifat keamanan masih diatur oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Artinya, pemerintah Belanda dibantu oleh Opsir Tionghoa tersebut, sehingga urusan sipil sudah diambil alih sedikitnya oleh orang-orang Tionghoa sendiri. Sistem yang dibuat ini juga berbeda perlakuan terhadap etnis Tionghoa dengan orang-orang pribumi lainnya.

perbedaan perlakuan didasari pada administrasi yang mengakibatkan berbeda secara psikologis dengan bangsa lainnya. Sejak itu pemerintah Belanda menanamkan suatu bibit perbedaan terhadap bangsa Indonesia. warga Tionghoa menerapkan sistem ini pada masyarakat Tionghoa di Batavia. Pada tahun 1619, Souw Beng Kong di pilih oleh JP Coen dari 400 penduduk Tionghoa yang bermukim di Batavia dan diberi kuasa memerintahkan rasnya sendiri dalam urusan sipil. Namun untuk hal keamanan masih diserahkan pada pihak Belanda.

Pola Pemukiman Orang Tionghoa

Leo Suryadinata dalam bukunya juga menyebutkan, bahwa sistem pemukiman atau *Wijken stelsel*, berhubungan erat dengan sistem opsir dalam arti bahwa orang Tionghoa akan diurus oleh kepala kelompok dari kalangan ras mereka sendiri dan diwajibkan tinggal di daerah tertentu jauh dari ras lain. Sistem pemukiman ini awal-awal diterapkan pada tahun 1835 di pulau Jawa. Peraturannya berbunyi: "Orang Timur asing penduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah pimpinan kepala mereka masing-masing." (Suryadinata, 2002). Sistem pas jalan dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan untuk kepentingan perdagangan, industri, bisnis dan usaha lainnya. pas jalan ini digunakan untuk kepentingan bisnis dan jika tidak diperlukan lagi segera di cabut. Pas jalan ini juga digunakan untuk mengontrol etnis Tionghoa agar tidak berkontak dan bersekongkol dengan ke etnis pribumi untuk menentang pemerintah Belanda. Oleh karena itu pas jalan ini juga sistem simbol identitas etnis Tionghoa dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemerintah Belanda maupun dengan bangsa pribumi.

Di samping itu pemukiman khusus etnis Tionghoa disebutkan dalam Wong sebagai berikut:

Untuk memaksimalkan suatu eksploitasi mereka terhadap Indonesia, pihak pemerintah Belanda melaksanakan suatu kebijakan kolonial yang disebut 'Kultur Stelse'. Pada dasarnya, orang Tionghoa di tempatkan di posisi anatara di bawah seluruh struktur kasta kolonial, yang terpisah dari elit penguasa maupun penduduk pribumi. Sementara etnis Tionghoa dilarang memasuki setor yang modern seperti perkebunan, pertambangan, keuangan, dan perdagangan ekspor yang dikuasai oleh pihak Belanda, etnis Tionghoa juga dilarang memiliki dan menanamkan tanah. Lowongan yang terbuka bagi etnis Tionghoa hanyalah perdagangan enceran, perpinjaman uang, dan usaha-usah lain yang tidak mendekati mereka kepada nasionalitas Indonesia. dengan cara aliansi ekonomi dan sosial dari penduduk lokal menyebabkan orang Tionghoa ini politis rawan dan membuat mereka tampak di mata pribumi sebagai orang asing pemerias atau kaki tangan Belanda. dengan perkataan lain, lama sebelum Indonesia merdeka, kebijakan kolonial Belanda telah menanamkan bibit-bibit pertentangan antara Tionghoa dengan masyarakat pribumi (Wong, 1987).

Pemisahan pemukiman, penetapan kasta, posisi di bawah struktur Belanda dan pembatasan-pembatasan kiprah dalam perdagangan membuat etnis Tionghoa menjadi berbeda dan terpisahkan secara psikologis ekonomi maupun secara hukum. Dengan adanya kebijakan Belanda terhadap etnis Tionghoa akhirnya membentuk karakter mereka yang senang berkelompok sendiri dan membuat mereka benar-benar membuat mereka terjauh dari jangkauan sosial dan masyarakat pribumi. Demikian terbatasnya kegiatan ekonomi membuat mereka juga tertekan dikarenakan etnis Tionghoa tidak diperbolehkan terlibat di perkebunan dan pertambangan dan ekspor-impor. Padahal secara ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia sangat menguasai sistem pasar yang berlaku, di Indonesia maupun perdagangan internasional. Adanya kebijakan tersebut dari pemerintah Belanda terkesan bahwa etnis Tionghoa adalah pemerias dan antek Belanda. menurut Wong: "Terpisahnya orang Tionghoa secara politis dan sosial di Indonesia, seperti bagian-bagian Asia Tenggara lainnya, merupakan juga disebabkan oleh sikap tradisional mereka sendiri yang terlalu taat pada kebijaksanaan pada umumnya yang mereka kenakan sendiri (*self-imposed*) untuk tidak terlibat (*non-involvement*) dalam gerakan politik lokal dan berusaha mempertahankan dengan kuat identitas kebudayaan mereka" (Wong, 1987).

Etnis Tionghoa terlalu taat kepada kebudayaan leluhurnya sehingga membuat etnis Tionghoa terpisah dari masyarakat pribumi lain yang berda di Nusantara. Etnis Tionghoa yang cinta tanah leluhurnya nenek moyangnya serta kuatnya ikatan emosional terhadap budaya China membuat identitas yang berbeda dengan masyarakat lainnya sehingga tidak dapat meleburkan diri secara total ke dalam kultural Indonesia. Di samping itu etnis Tionghoa lebih loyalitas terhadap budaya China dapat membentuk sikap lebih bangga terhadap budaya sendiri sehingga menganggap budaya lainnya lebih rendah sehingga terbentuk pemujaan terhadap budaya leluhurnya. Oleh sebab itu, terjadi pemukiman yang terpisah dari kelompok lain sehingga cenderung eksklusif dan etnosentrisme. Kebiasaan mempertahankan dan fanatik terhadap budaya sendiri membentuk kultur Tionghoa perantaraan tidak disenangi oleh kebanyakan pribumi. Dengan demikian halnya penetralan pergerakan terhadap perjuangan kemerdekaan membuat masyarakat pribumi terhadap etnis Tionghoa sehingga tidak loyol terhadap pemerintah dan perjuangan kemerdekaan. Dengan kata lain, penetapan etnis Tionghoa terpisah dengan yang lain membuat mereka terbentuk karakter yang suka berkumpul dengan sesama mereka dan juga cinta terhadap budaya sendiri yang terlalu berlebihan, sehingga enggan berbaur dengan dengan pribumi sekaligus keraguan masyarakat pribumi terhadap kesetiaan mereka kepada negara Indonesia.

Pola pemukiman etnis Tionghoa yang telah terbentuk ratusan tahun itu secara turun-temurun diwariskan kepada anak dan cucu mereka yang tinggal di Nusantara. Kebiasaan hidup etnis Tionghoa dengan hidup budaya sendiri membentuk kesenjangan budaya dengan masyarakat lain. Demikian juga dengan tempat tinggal yang terasing dengan masyarakat

pribumi. Kebiasaan tinggal dengan kelompok sendiri, dapat mempertahankan identitas etnisnya sekaligus identitas budaya mereka juga dapat terpelihara.

Terbentuknya suatu kelompok masyarakat terkonsentrasi secara budaya dan ras, membentuk suatu kesenjangan dan kerenggangan sosial sehingga interaksi dengan etnis lainnya sangat terbatas. Dengan terbatasnya tersebut terbentuknya integrasi dan komunikasi dengan etnis lain akan tercipta suatu kecemburuan sosial dalam masyarakat. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai ragam etnis dan subetnis telah terbiasa hidup berdampingan. Akan tetapi pembentukan pemukiman yang diciptakan sekaligus mempertahankan budaya yang berlebihan sehingga terhambat interaksi dan komunikasi dengan etnis di luar kelompoknya (Usman, 2009).

Sehubungan hal tersebut etnis Tionghoa di Banda Aceh yang telah hidup ratusan tahun, mereka terbiasa tinggal di daerah yang mayoritas beragama Islam. Tetapi kehidupan etnis Tionghoa di Banda Aceh berjalan seperti daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. dengan kata lain, pola pemukiman yang terbiasa hidup berkelompok tersebut berada di Peunayong Kecamatan Kuta Alam. Pola pemukiman yang berada di Peunayong di tempat keramaian dan tempat berbisnis. Peunayong merupakan perkampungan China. Peunayong sebagai pusat orang melakukan transaksi bisnis yang sudah berdiri sejak pemerintahan Hindia Belanda, hampir semuanya dimiliki oleh etnis Tionghoa. Di Peunayong pertokoan yang tua semuanya dihuni oleh etnis Tionghoa. Terkonsentrasinya pemukiman di Peunayong menyebabkan etnis Tionghoa setiap hari berinteraksi dengan sesama etnisnya.

Eksistensi etnis Tionghoa di Peunayong membentuk suatu Chinatown di Kota Banda Aceh. Kawasan Peunayong yang di padati dengan pertokoan etnis Tionghoa yang semuanya di jadikan tempat bisnis seperti toko kelontong, bengkel maupun alat elektronik lainnya. Etnis Tionghoa selalu berkegiatan bisnis, bahkan bekerjasama dan saling berbagi berinteraksi sesama etnisnya (Sutrisna, 2008). Perkampungan etnis Tionghoa di Peunayong banyak sekali yang tinggal oleh etnis Tionghoa yang sangat tersusun rapi sehingga etnis lain sangat sulit untuk masuk dalam wilayah bisnis mereka. Etnis Tionghoa selain membuka toko, mereka ada juga bergerak di bidang perhotelan seperti Hotel Medan, Hotel Prapat, dan juga Hotel Wisata. Terbentuknya pemukiman tersebut dapat berbentuk suatu sifat yang senang terisolir dengan masyarakat pribumi. sehubungan dengan interaksinya dengan masyarakat Aceh, data lapangan menunjukkan sebagai berikut:

Ibu Lutvia merupakan seorang etnis Tionghoa yang sudah lahir di Banda Aceh. Ibu Lutvia mengatakan mereka sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat Aceh selain bertransaksi dalam hal dagang. Di warung ibu Lutvia memang ada seorang anak Aceh asli yang bekerja bersamanya untuk membantunya di warung, hanya dengan dia yang sering berinteraksi itupun di karenakan dia sebagai karyawannya. Sedangkan dengan masyarakat yang lain ibu Lutvia hanya berinteraksi ketika pergi kepasar Peunayong untuk membeli kebutuhan pokok. Dia berinteraksi dengan orang Aceh kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia walaupun dia sendiri juga mengerti berbicara bahasa Aceh (Wawancara dengan Luthvia (penjual Mie Kocok), Banda Aceh, 20 Desember 2020).

Dari penuturan ibu Luthvia, dia sangat jarang berinteraksi dengan orang Aceh. Hal tersebut diakibatkan karena kesibukan beliau dalam berdagang setiap hari. Meskipun demikian dia sangat suka hidup orang Aceh, walaupun dipenayong banyak etnis Tionghoa yang hidup dipertokoan. Namu di pasar-pasar banyak orang Aceh yang berjualan ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan disepanjang emperan toko. Walaupun seperti itu kehidupan bertetangga di Peunayong bukan menjadi persoalan bagi mereka.

Terbentuknya pemukiman dapat membatasi komunikasi dengan etnis Aceh di Peunayong karena selain etnis Tionghoa sangat cepat komunikasi dengan sesama mereka, dan sangat kuat jaringannya di Banda Aceh. Seandainya ada berita sesuatu dari mereka atau dari pemerintah dan lainnya yang berhubungan dengan etnis Tionghoa mereka sangat tersebar. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak T. Sabri Harun:

Pak Sabri merupakan warga asli Peunayong yang saat ini menjabat sebagai kepala Desa Peunayong. Beliau mengatakan, sejak muda beliau sudah bergaul dengan kelompok etnis Tionghoa. ketika disela-sela kesibukan beliau sering berkumpul dan berinteraksi dengan etnis Tionghoa. Pak Sabri juga mengatakan, jika ada berita dari pemerintahan Kampung Peunayong beliau segera memberi tahu masyarakat lainnya. oleh sebab itu jaringan sesama etnis Tionghoa di Banda Aceh khususnya Kampung Peunayong (Wawancara dengan Bapak T. Sabri Harun, (Kepala Desa Peunayong), Banda Aceh, 17 Desember 2020). Hal senada juga di utarakan oleh Pak Aky yang menyatakan bahwa jaringan sesama etnis Tionghoa sangat bagus, apalagi ada organisasi yang menaungi mereka. Pak Aky mengatakan, salah satu fungsi organisasi serti HAKKA ini untuk mempercepat komunikasi antar sesamanya jika ada sesuatu terjadi. Apalagi sekarang ini sudah ada alat komunikasi yang canggih seperti WA. Ketika ada berita dari desa atau yang lainnya akan segera di kirim kedalam WA tersebut (Wawancara dengan Kho Khie Siong (Ketua Yayasan HAKKA Aceh), Banda Aceh, 7 Desember 2020).

Menurut Kepala Desa Peunayong Sabri, bagusnya jaringan antar sesama etnis Tionghoa yang menyebabkan mereka cepat berhasil terutama di kalangan bisnis. Mengenai interaksi dengan masyarakat Aceh berlangsung biasa sebab etnis Tionghoa sangat disibukkan dengan bisnisnya. Namun demikian di Kampung Peunayong kehidupan etnis Aceh tidak terkonsentrasi tetapi mereka hidup dengan bersama etnis lainnya. Kehidupan bertetangga di Kampung Peunayong berjalan dengan baik dan tidak pernah terjadi sesuatu kerusuhan dan kesenjangan sosial yang berarti. Demikian dengan masyarakat Aceh sebenarnya tidak mau tahu dengan kehidupan lain asal jangan terusik sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Sehubungan dengan pola pemukiman, data lapangan menunjukkan sebagai berikut:

Danang Lee seorang pemuda etnis Tionghoa yang lahir Banda Aceh. Kehidupannya di Aceh sangat nyaman dan tidak merasa terasing dengan orang-orang Aceh. Hal ini dikarenakan di dari dulu sudah berteman dan bersekolah di Negeri dan pergaulan dengan etnis Aceh suatu yang sudah biasa baginya. Hubungan dengan sesama etnis dan etnis Aceh yang berada di Peunayong berlangsung secara normal dan juga rumah kediamnya bertetangga dengan etnis Aceh. Dalam komunikasi sehari-hari Danang akan menyesuaikan dengan lawan bicaranya. Kalau berbicara dengan orang Aceh biasanya akan menggunakan bahasa Aceh, jika sesama etnis Tionghoa akan bicara bahasa Indonesia, hal ini dikarenakan beliau kurang menguasai bahasa Mandarin. Danang sendiri saat ini bekerja di toko foto copy milik orang tuanya di kawasan Peunayong. Danang sering berpergian dengan pemuda-pemuda kampung Peunayong yang beretnis Aceh dan juga dia sering pergi keliling keluar daerah dengan teman-teman Aceh lain. Karena dia sering melakukan aktivitas dengan orang Aceh. Oleh Karenanya interaksi dengan orang Aceh berlangsung normal (Wawancara dengan Danang Lee (Pemuda etnis Tionghoa) Banda Aceh , 4 Januari 2021).

Pemukiman etnis Tionghoa di Banda Aceh yang berada di Peunayong. Menurut pengamat penulis, etnis Tionghoa kebanyakan tinggal di toko-toko. Keberadaan toko milik etnis Tionghoa, juga dimanfaatkan sebagai tempat dagang sekaligus digunakan tepat tinggal. Jika etnis Tionghoa tinggal di rumah kebanyakan tinggal berdampingan dengan sesama etnisnya. Kebanyakan rumah-rumah etnis Tionghoa agak tertutup dikarenakan memiliki pagar rumah yang tinggi dan kadang peliharaan seekor anjing penjaga. Bagi etnis Tionghoa memelihara anjing untuk bertujuan menjaga rumah mereka dari hal yang tak diinginkan seperti, pencurian dan hal-hal lainnya.

Penulis juga mengamati, etnis Tionghoa yang tinggal dilingkungan atau berdampingan dengan etnis Aceh lebih mudah berinteraksi dan sangat bersahabat dibandingkan dengan tinggal dengan sesama etnisnya. Etnis Tionghoa yang tinggal di lingkungan masyarakat Aceh selain komunikasi yang lebih mudah dengan orang lain, pada umumnya dapat berbicara dalam bahasa Aceh sekaligus tidak menaruh curiga kepada orang lain. Dengan kata lain, etnis Tionghoa yang tinggal berdampingan dengan lingkungan masyarakat Aceh lebih bersahabat dan mudah berkomunikasi.

Kehidupan etnis Tionghoa yang sudah terbiasa hidup dengan komunitas dirinya dari dulu memang dikondisikan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga sampai saat ini mereka lebih sering tinggal di komunitas mereka sendiri. Begitu juga dalam mempertahankan identitas budaya dan cinta kebudayaan yang membuat etnis Tionghoa lebih tinggal di tempat yang banyak dihuni oleh etnis sendiri. begitu juga dengan kebiasaan berbisnis mereka yang sudah di wariskan secara turun-temurun membuat etnis Tionghoa lebih nyaman tinggal di kelompoknya sendiri. Hal tersebut juga terjadi oleh etnis Tionghoa yang berada di Banda Aceh sampai sekarang masih berlaku dan mentradisi bagi etnis Tionghoa sendiri. hubungan yang dibentuk tersebut membuat mereka menjadi lebih dekat dan percaya terhadap etnis Tionghoa dari pada etnis lain. Etnis Tionghoa yang tinggal di Peunayong kebanyakan berbisnis dan dapat disebut kelas menengah ke atas. Karena banyak etnis Tionghoa tinggal di tempat keramaian sekaligus lebih gampang berinteraksi dengan teman-temannya sesama berbisnis. Sebaliknya etnis Tionghoa kelas menengah lebih memilih tinggal dipinggiran kota dikarenakan tidak terlalu mahal biayanya. Sedangkan yang etnis kelas menengah lebih memilih tinggal di kota sesama kelompoknya, sekaligus untuk menjaga identitas mereka. Seperti yang terjadi di kawasan Peunayong, yang lebih banyak dihuni oleh etnis Tionghoa yang merupakan kelas menengah atas. Hal ini dapat dilihat dari pergaulan dan perilaku mereka. Kecenderungan menyatukan diri pada suatu profesi juga mereka lebih memilih tinggal di dalam kelompok sendiri.

Kemudian etnis Tionghoa yang berada di Peunayong lebih eksklusif. Hal ini di akibatkan mereka adalah pelaku bisnis di Aceh, juga keinginan bergabung dengan kelompok sesama profesi semakin jelas. Fenomena eksklusif etnis Tionghoa di Peunayong dapat dilihat saat seseorang yang mereka tidak mengenal mengajak berbicara dengan mereka. Dalam hal ini etnis Tionghoa agak lebih tertutup sebelum mengenal orang yang mereka ajak bicara. Hal ini sering dialami orang-orang Aceh ketika mereka mengajak berbicara kepada lawan yang belum dikenal, hal ini penulis juga mengalami ketika mewawancarai beberapa etnis Tionghoa di Peunayong. Mereka lebih memilih menghindar, jikapun ada yang mau, mereka tidak terlalu terbuka. Namun demikian etnis Tionghoa yang bisa berbahasa Aceh lebih cepat akrab dari pada etnis Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Aceh.

Pandangan Masyarakat Banda Aceh terhadap Etnis Tionghoa di Peunayong

Dari hasil data yang peneliti dapatkan dari masyarakat Banda Aceh khususnya di Kampung Peunayong memiliki penilaian beragam pendapat etnis China dalam pandangan terhadap etnis Tionghoa yang berada di Peunayong yang mana pandangan tersebut lebih mengarah ke positif. Bentuk pandangan masyarakat Aceh terhadap etnis Tionghoa di Banda Aceh khususnya kawasan Peunayong:

a. Pekerja Keras

Etnis Tionghoa yang berada di Banda Aceh memiliki etos kerja yang tinggi, salah satunya tercermin pada sifat kerja kerasnya, dalam membangun usahanya dalam perdagangan. Etnis Tionghoa selalu menekankan pada pentingnya kerja keras, karena kesuksesan tidak bisa diraih tanpa adanya kerja keras. Prinsip tersebut yang mendorong dan tertanam dalam diri etnis Tionghoa dari turun-temurun.

b. Tegas

Etnis Tionghoa sangat tegas dari sikap mereka tidak suka bertele-tele dalam aktivistas mereka dalam berdagang sangat menghargai waktu karena prinsip dalam kebudayaan Tionghoa bahwa waktu adalah uang.

c. Pelit

Hal ini sudah menjadi pandangan umum bagi masyarakat Aceh, bahwa etnis Tionghoa sangat sulit dalam tawar-menawar masalah dagang. Maka banyak masyarakat Aceh menganggap etnis Tionghoa sangat pelit. Selain itu alasan lain berupa gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan dari usaha mereka, hingga muncul opini “bahwa etnis Tionghoa untuk dirinya sendiri sangat pelit”, namun silur itu semua, etnis Tionghoa yang sangat berpegang prinsip yang diajarkan oleh leluhur mereka, salah satu prinsip yang mereka jalankan sampai saat ini yaitu hemat dan hidup sederhana, itu alasan kenapa masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Banda Aceh terlihat biasa-biasa saja, bertolak belakang dengan apa yang mereka raih dari usaha mereka.

d. Kurang Bersosialisasi

Seperti yang diketahui etnis Tionghoa sangat jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat pribumi, mereka lebih sering berkumpul dengan sesama etnisnya. Begitu juga dengan tempat tinggal mereka lebih senang tinggal di lingkungan yang banyak etnis Tionghoa dan tidak banyak dari mereka yang tinggal dengan etnis Aceh. Menurut penulis dari hasil pengamatan dan menanyakan beberapa sumber. Agar lebih cepat bergaul dengan etnis Tionghoa di Banda Aceh, seseorang harus mengenal lebih jauh dan mempelajari budaya, bahasa Mandari, dan seni olah raga mereka seperti Wushu, Baronsai dan sebagainya. Memasuki budaya mereka itu akan lebih akrab dalam pergaulan dengan etnis Tionghoa. interaksi etnis Tionghoa di Peunayong dengan masyarakat Banda Aceh berlangsung di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat transaksi seperti pasar-pasar dan toko-toko milik etnis Tionghoa.

KESIMPULAN

Etnis Tionghoa sudah berada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia khususnya Aceh, pada saat itu di Komandoi oleh Laksamana Cheng Ho dengan ratusan kapal dan ribuan pasukan di bawahnya. Tujuan etnis Tionghoa adalah untuk menjalin kerjasama dalam hal perdagangan. Hubungan etnis Tionghoa dengan masyarakat Aceh terus berlanjut sampai pemerintah Kolonial Hindia Belanda membawa rombongan etnis Tionghoa ke Aceh tepat di Kampung Peunayong untuk di pekerjakan sebagai buruh dan ada juga yang berdagang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahannya. Selanjutnya pemerintah Kolonial Belanda membentuk pemukiman untuk etnis Tionghoa di Banda Aceh di kawasan Peunayong. Hal tersebut bertujuan agar etnis Tionghoa untuk tidak berhubungan dengan etnis pribumi. Kampung Peunayong tersebut di jadikan tempat transaksi bisnis dari jaman Belanda sampai saat ini. Kampung Peunayong sekarang selalu ramai dikunjungi untuk melakukan transaksi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Aceh.

REFERENSI

- Abidin, Y. Z. (2016). *Tionghoa, Dakwa dan Keindonesia*. Mimbar Pustaka.
- Coppel, C. A. (1994). *Tionghoa Indonesia dalam krisis*. Pustaka Sinar Harapan.
- Dahana, A. (2000). Kegiatan Awai Masyarakat Tionghoa di Indonesia. *Wacana*, 2(1), 54–72.
- Ferlando, E., & Agustono, R. (2019). EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DALAM BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA DI INDONESIA TAHUN 1966-2016. *SWARNADWIPA*, 2(3).
- Kwartanada, D. (2009). Rustopo, Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998, with foreword by Bambang Purwanto. *Archipel*, 77(1), 219–222.
- Nontji, A. (2020). “Laksamana Cheng Ho Dari Tingkok : Pelayaran Muhibah dari Syiar Islam di Nusantara.” Nanopdf.Com.
- Putra, H. (2020). “Warisan Cheng HO di Banda Aceh.” Kesbangpol Banda Aceh.
- Putri, R. H. (2020). “Catatan Pertama Kedatangan Orang Tionghoa Ke Nusantara.” HISTORIA.
- Rahman, M. T. (2010). Pluralisme Politik. *WAWASAN: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 34(1), 1–13.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Penerbit Serambi.
- Said, I. (2019). HUBUNGAN ETNIS CINA DENGAN PRIBUMI:(Sebuah Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(1).
- Setiawan, M. (2017). *Kajian Komparatif Budaya Perdagangan Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Aceh Di Kota Takengon*.
- Suryadinata, L. (2002). *Negara dan etnis Tionghoa: kasus Indonesia*. LP3ES.
- Sutrisna, D. (2008). *Peunayong kampung Lama Etnis Cina di Kota Banda Aceh*. Balai Arkeologi Medan.
- Usman, A. R. (2009). *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wong, J. (1987). *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*. Bumi Aksara.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).